



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Sosialisasi Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Warsa Biak Utara

Hamza Toatubun



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/issue/view/33>
DOI: 10.46924/legalempowerment.v1i2.199
ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Toatubun, Hamza. (2023). Sosialisasi Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Warsa Biak Utara. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 102-111.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Sosialisasi Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Warsa Biak Utara

Hamza Toatubun

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
khairilhamza@gmail.com

Abstract: In the government order of the Republic of Indonesia, the regions of Indonesia are divided into large regions and small regions. The village or kelurahan is the lowest level of government. In this case, the government of Warsa Biak Utara Village, Biak Numfor Regency is part of the national governance system, with the Biak Numfor Regency government directly under it. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has done many things to improve community welfare through good services and optimal performance directly and transparently. With regional autonomy, local governments can pay more attention to remote areas in the context of equitable development. Equitable development in agriculture and education, especially in targeted villages, will increase community participation. In this case, village partners only provide independent agents to oversee village governance and public services. Apart from the fact that BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) or bamuskam (village consultative body) already exists in the village. Through this community service, students conduct socialization through the lecture method.

Keywords: *Socialization, Development, Welfare, Bumdes*

Abstrak: Dalam tatanan pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil. Desa atau kelurahan adalah tingkat pemerintahan terendah. Dalam hal ini, pemerintahan Desa Warsa Biak Utara Kabupaten Biak Numfor merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor langsung di bawahnya. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang baik dan kinerja yang optimal secara langsung dan transparan. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dalam bidang pertanian dan pendidikan, khususnya di desa yang tepat sasaran, akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, mitra desa hanya menyediakan agen independen untuk mengawasi pemerintahan dan pelayanan publik desa. Terlepas dari fakta bahwa BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) atau bamuskam (badan musyawarah kampung) sudah ada di desa. Melalui pengabdian masyarakat ini mahasiswa melakukan sosialisasi melalui metode ceramah.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Pembangunan, Kesejahteraan, Bumdes*

1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya kemandirian desa dalam mengelola potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹ Salah satu tujuan dari BUMDes adalah guna mendorong dan menggerakkan perekonomian desa, meningkatkan ekonomi masyarakat desa serta menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berada di desa.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan BUMDes, desa dapat mengelola aset-aset dan sumber daya lokalnya secara optimal.² Misalnya, memanfaatkan lahan, air, atau hasil pertanian untuk dikembangkan menjadi produk atau jasa bernilai ekonomi tinggi. Ini akan meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa tidak lagi terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. BUMDes juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Unit-unit usaha yang dikembangkan dapat menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan warga. Hal ini ikut memperkuat kohesi sosial di desa. Tak hanya itu, keuntungan dari usaha BUMDes juga akan menambah kas desa. Semakin berkembang BUMDes, semakin besar pula kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa. Dengan demikian, BUMDes berperan sentral dalam mendorong kemandirian ekonomi desa, mengelola potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Beberapa desa di Indonesia yang sudah secara optimal dapat mengelola BUMDes secara optimal antara lain adalah Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta BUMDes Panggungharjo diberi nama "Mandiri". Berdiri sejak tahun 2015 serta focus unit usaha yang dilakukan antara lain unit simpan pinjam, agrobisnis, air bersih, sampah, serta unit lainnya.³ Hasilnya, Desa Warsa kini menjadi salah satu desa yang mandiri secara ekonomi dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik bagi warganya. BUMDes Desa Warsa Biak Utara Kabupaten Biak Numfor, yang diberi nama "BUMDesa Maneru". Potensi yang diandalkan dari BUMDes desa Bumen berada di berbagai sector diantaranya unit pertanian, perikanan, perdagangan, dan simpan pinjam. Keberhasilan ini telah meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan mensejahterakan masyarakat Desa Warsa.⁴ Selain itu Desa Karang Tengah, Wonosobo, Jawa Tengah telah sukses dalam menjalankan BUMDes yang dimilikinya. BUMDes yang diberi nama "Amanah" telah berhasil mengelola unit usaha simpan pinjam, pertanian, dan peternakan dengan baik. Hasilnya, desa ini kini mampu

¹ Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013).

² Abdul Karim, "Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Nas Media Pustaka, Makassar*, 2019.

³ Teguh Budi Prasetya and Niken Widyastuti, "Penguatan Kelembagaan Sosial-Ekonomi Desa Melalui BUMDes Pangung Lestari Di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul," *Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 1 (2020): 55–66.

⁴ Garnies Lellyana Sagita, Ni'ami Mutimatun, and M SH, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta memberikan bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Namun, pada kenyataannya masih banyak desa yang belum optimal dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes sebagai penggerak pembangunan dan peningkatan ekonomi desa. Seperti contoh yang terdapat di desa Warsa Biak Utara Kabupaten Biak Numfor. Terdapat ragam potensi sumber daya alam yang secara maksimal belum dapat dimanfaatkan secara bijak dan optimal. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat yang berada di kampung tersebut. Permasalahan yang sering ditemui antara lain kurangnya pemahaman masyarakat desa terhadap peran dan potensi BUMDes, minimnya keterampilan pengelolaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha BUMDes.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Desa Warsa, Biak Utara, terkait peran strategis BUMDes dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan desa. Diharapkan, setelah kegiatan ini, masyarakat desa memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan serta pengembangan BUMDes di wilayahnya masing-masing.

2. Metode Pelaksanaan

Berikut metode pelaksanaan untuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Bersama sejumlah dosen

- a. Ceramah dan Diskusi Interaktif
 - Metode ini akan digunakan untuk memberikan pemaparan materi tentang konsep, peran, dan potensi BUMDes dalam pembangunan desa.
 - Pemateri akan mendorong partisipasi aktif peserta melalui sesi tanya jawab dan diskusi terbuka.
- b. Lokakarya Pengembangan BUMDes
 - Peserta akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan identifikasi potensi lokal, perencanaan unit usaha, dan penyusunan rencana bisnis BUMDes.
 - Fasilitator akan memberikan pendampingan dan bimbingan teknis selama proses lokakarya.
- c. Kunjungan Lapangan (*Site Visit*)
 - Peserta akan melakukan kunjungan ke BUMDes yang telah berhasil di desa lain untuk pembelajaran langsung.
 - Kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran nyata dan inspirasi bagi pengembangan BUMDes di Desa Warsa.
- d. Tahapan Kegiatan:
 - a) Persiapan
 - Koordinasi dengan perangkat desa Warsa
 - Penyusunan materi sosialisasi dan lokakarya
 - Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan
 - b) Pelaksanaan
 - Pembukaan dan sambutan dari perangkat desa
 - Sesi ceramah dan diskusi interaktif
 - Lokakarya pengembangan BUMDes
 - Kunjungan lapangan ke BUMDes contoh

- Refleksi dan rencana tindak lanjut
- c) Evaluasi
 - Penilaian tingkat pemahaman dan partisipasi peserta
 - Identifikasi kendala dan rekomendasi perbaikan
 - Penyusunan laporan akhir kegiatan
- e. Peserta/Audiens:
 - 1) Perangkat desa Warsa (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD)
 - 2) Pengurus BUMDes Warsa (jika sudah ada)
 - 3) Perwakilan kelompok masyarakat (Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani, dll)
 - 4) Tokoh masyarakat dan pemuda desa

Diharapkan melalui metode dan tahapan kegiatan tersebut, pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Desa Warsa mengenai potensi BUMDes dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengembangan BUMDes di wilayahnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemahaman Masyarakat Desa Warsa tentang Peran dan Potensi BUMDes

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif dengan masyarakat Desa Warsa, dapat disimpulkan bahwa pemahaman awal mereka terkait konsep, tujuan, dan manfaat BUMDes bagi pembangunan serta kesejahteraan desa masih terbatas, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemahaman Konsep BUMDes:
 - Sebagian besar masyarakat Desa Warsa belum memiliki pemahaman yang jelas tentang definisi dan konsep dasar BUMDes.
 - Masyarakat desa warsa cenderung memandang BUMDes hanya sebagai unit usaha sederhana milik desa, tanpa mengetahui kerangka hukum dan kelembagaannya.
- 2) Pemahaman Tujuan BUMDes:
 - Masyarakat desa masih belum sepenuhnya memahami tujuan utama pembentukan BUMDes, yaitu untuk mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Sebagian besar warga beranggapan bahwa BUMDes hanya bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes), tanpa pemahaman yang lebih luas.
- 3) Pemahaman Manfaat BUMDes:
 - Mayoritas masyarakat Desa Warsa belum memahami berbagai manfaat potensial BUMDes bagi pembangunan desa, seperti menciptakan lapangan kerja, mengelola aset desa, dan meningkatkan pelayanan publik.
 - Warga masih terbatas dalam melihat manfaat BUMDes, hanya sebatas pada peningkatan pendapatan desa secara parsial.

Temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat Desa Warsa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep, tujuan, dan manfaat BUMDes. Hal ini menjadi landasan penting bagi partisipasi aktif warga dalam pengembangan BUMDes di desa mereka.

Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan masyarakat Desa Warsa, dapat diidentifikasi beragam persepsi dan harapan mereka terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa mereka.

Sebagian besar warga memandang BUMDes sebagai sebuah peluang bagi Desa Warsa untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka berharap agar BUMDes dapat menjadi penggerak roda perekonomian desa dengan mengelola aset-aset desa secara lebih produktif.

Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang masih ragu dan khawatir dengan keberadaan BUMDes. Beberapa di antaranya mempertanyakan apakah BUMDes benar-benar akan memberikan manfaat bagi warga, atau justru hanya akan menambah beban bagi desa. Ada pula kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes oleh perangkat desa.

Di sisi lain, masyarakat juga mengharapkan agar BUMDes dapat menjadi wadah bagi mereka untuk terlibat dan berkontribusi secara aktif. Warga berharap dapat berpartisipasi dalam menentukan jenis usaha, mengembangkan keterampilan, serta memperoleh manfaat ekonomi secara adil dari keberadaan BUMDes.

Lebih jauh, masyarakat Desa Warsa juga berharap pemerintah desa dapat memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi permodalan, pelatihan, maupun pendampingan, agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Mereka menyadari bahwa keberhasilan BUMDes akan berdampak langsung pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di desa mereka.

Dengan memahami berbagai persepsi dan harapan masyarakat tersebut, diharapkan pengembangan BUMDes di Desa Warsa dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif warga, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan desa.

3.2. Potensi Pengembangan Unit Usaha BUMDes di Desa Warsa

Menggali dan mengembangkan potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu desa. Berikut adalah pengantar mengenai pentingnya upaya ini:

Desa-desanya di Indonesia pada umumnya memiliki beragam potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Namun, potensi ini seringkali belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal oleh desa.

Kehadiran BUMDes menjadi instrumen strategis bagi desa untuk mengelola aset dan sumber daya lokalnya guna mendorong kemandirian ekonomi dan pembangunan desa. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi-potensi ini melalui unit-unit usaha BUMDes, desa dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk membiayai pembangunan.⁵

⁵ Shanti Veronica br Siahaan and Benedhikta Kikky Vuspitasari, "Sinergi Kades, Bpd Dan Pengurus Bumdes Dalam Mewujudkan Pendapatan Asli Desa Melalui Kegiatan Bumdes," *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 7, no. 2 (2020): 164–79.

Upaya menggali potensi pengembangan BUMDes juga penting karena dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa. Keterlibatan warga dalam pengelolaan BUMDes akan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan. Selain itu, masyarakat juga akan dapat menikmati hasil dari pengembangan potensi lokal dalam bentuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, identifikasi dan pengembangan potensi BUMDes menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh desa-desa, termasuk Desa Warsa, agar dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis selama kegiatan lokakarya, Desa Warsa memiliki beragam potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi unit-unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun potensi-potensi tersebut antara lain:

Kekayaan Laut Desa Warsa memiliki garis pantai yang cukup panjang, sehingga memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan antara lain:

- 1) Perikanan tangkap, dengan keanekaragaman ikan yang dapat diolah menjadi produk perikanan bernilai ekonomi tinggi.
- 2) Budidaya ikan laut, seperti kerapu, udang, dan rumput laut yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir desa
- 3) Pengolahan hasil laut, seperti pengasinan, pengeringan, dan pembekuan ikan serta hasil laut lainnya

Kekayaan Hutan Desa Warsa memiliki kawasan hutan yang cukup luas, dengan keanekaragaman jenis pohon dan tanaman hutan. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain:

- 1) Pengolahan hasil hutan non-kayu, seperti madu hutan, buah-buahan, dan tanaman obat.
- 2) Pengembangan ekowisata hutan, dengan memanfaatkan keindahan alam dan kearifan lokal masyarakat.
- 3) Industri pengolahan kayu, seperti furnitur, kerajinan, dan bahan bangunan dari kayu.

Selain itu produksi kelapa yang sangat melimpah di Kawasan tersebut yang memungkinkan bagi sejumlah penduduk untuk memanfaatkan kelapa tersebut dari akar hingga daunnya.

Sebagai desa yang terletak dekat dengan pantai, Desa Warsa memang sangat potensial untuk mengembangkan usaha yang berbasis pada komoditas kelapa. Beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan antara lain:

Pengolahan buah kelapa

- Desa Warsa dapat mengembangkan usaha pengolahan berbagai produk dari buah kelapa, seperti kopra, minyak kelapa, santan, dan lainnya
- Produk-produk olahan ini memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi BUMDes.

Pengembangan perkebunan kelapa

- Dengan lahan yang subur dan iklim yang sesuai, BUMDes dapat melakukan budidaya kelapa secara intensif.

- Pengelolaan perkebunan kelapa secara profesional akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Diversifikasi usaha turunan kelapa

- Selain pengolahan buah kelapa, BUMDes juga dapat mengembangkan produk-produk turunan lainnya, seperti arang tempurung kelapa, kerajinan, hingga pengembangan ekowisata perkebunan kelapa.
- Diversifikasi usaha ini akan menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih beragam bagi desa.

Upaya pengembangan BUMDes berbasis potensi kelapa ini tentu harus didukung dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang profesional, serta keterlibatan aktif masyarakat desa. Dengan begitu, keberadaan BUMDes dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi kesejahteraan warga Desa Warsa.

Dengan mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut melalui BUMDes, Desa Warsa memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya ini juga akan memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

3.3. Peran Kemitraan dalam Mendukung Keberlanjutan BUMDes

Keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Warsa tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki atau kinerja pengelola saja, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain melalui kemitraan strategis.⁶ Membangun kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan menjadi kunci penting untuk mendukung pengembangan BUMDes secara berkelanjutan.

1. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mendukung keberlangsungan BUMDes di Desa Warsa. Beberapa bentuk kemitraan yang dapat dijalin antara lain:
 - a. Fasilitasi kebijakan dan regulasi yang mendukung operasional BUMDes.
 - b. Pendampingan teknis dan pelatihan bagi pengelola dan karyawan BUMDes
 - c. Dukungan permodalan melalui program-program pemberdayaan ekonomi desa
 - d. Bantuan pemasaran dan promosi produk-produk BUMDes.
2. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Untuk mengembangkan usaha-usaha BUMDes secara berkelanjutan, diperlukan akses permodalan yang memadai. Kemitraan dengan lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan mikro, dapat menjadi solusi dalam memperoleh pinjaman modal atau skema pembiayaan lainnya. Kemitraan ini juga penting untuk membangun kapasitas pengelolaan keuangan yang sehat bagi BUMDes.
3. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi Perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis bagi BUMDes Desa Warsa dalam hal pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan

⁶ Ade Rani Aprillia, Dwi Cahyono, and Ari Sita Nastiti, "Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)," *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 1, no. 1 (2021): 35–44.

inovasi. Kemitraan dengan perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui program-program seperti:

- a. Pendampingan dan pelatihan manajemen usaha bagi pengelola BUMDes.
 - b. Penelitian dan pengembangan produk atau jasa BUMDes.
 - c. Magang atau praktek kerja bagi mahasiswa di BUMDes.
 - d. Pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Kemitraan dengan Pelaku Usaha Lain BUMDes Desa Warsa juga dapat menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lain, baik dari sektor swasta maupun BUMDes desa lain yang sudah sukses. Kemitraan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti:
- a. Pemasaran dan distribusi produk.
 - b. Transfer teknologi dan inovasi.
 - c. Kerjasama produksi atau pengolahan hasil.
 - d. Pertukaran informasi dan pengalaman dalam mengelola usaha

Dengan membangun kemitraan strategis yang kuat dan saling menguntungkan, BUMDes Desa Warsa akan memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya, dukungan, dan peluang untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kemandirian ekonomi Desa Warsa.

Untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Warsa, pemanfaatan skema kemitraan dengan pihak-pihak terkait menjadi sangat penting. Melalui kemitraan, BUMDes dapat mengakses berbagai sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan, khususnya dalam hal permodalan, pemasaran, dan pengembangan kapasitas pengelola. Berikut adalah skema-skema kemitraan yang dapat dimanfaatkan:

1. Skema Kemitraan untuk Permodalan
 - a. Program Pinjaman Modal Bergulir atau Hibah dari Pemerintah Daerah
 - Mengakses program pemberdayaan ekonomi desa yang menyediakan dana bergulir atau hibah untuk modal usaha BUMDes. Contoh Program Pemberdayaan Ekonomi Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - b. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan
 - Menjalinkan kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan mikro untuk mendapatkan akses pinjaman lunak atau skema pembiayaan lainnya. Contoh Kemitraan dengan Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi Simpan Pinjam.
 - c. Kemitraan dengan Investor atau Pelaku Usaha Swasta
 - Bermitra dengan investor atau pelaku usaha swasta untuk mendapatkan suntikan modal atau skema bagi hasil usaha. Contoh Kemitraan dengan perusahaan perkebunan kelapa atau pengolahan hasil laut.
2. Skema Kemitraan untuk Pemasaran:
 - a. Kemitraan dengan Pelaku Usaha Lain
 - a. Menjalinkan kerjasama dengan pelaku usaha lain, baik swasta maupun BUMDes lain yang telah mapan, untuk mendistribusikan dan memasarkan produk secara lebih luas. contoh Kemitraan dengan BUMDes di desa lain yang bergerak di bidang pengolahan hasil laut atau pertanian.
 - b. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - Menjalinkan kemitraan untuk mendapatkan fasilitasi dalam promosi dan pemasaran produk BUMDes melalui berbagai program atau kegiatan yang

diselenggarakan. Contoh Kemitraan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengikuti pameran atau bazar produk unggulan daerah.

- c. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian
 - Berkolaborasi untuk melakukan riset pasar, pengembangan produk, dan strategi pemasaran yang efektif. Contoh Kemitraan dengan fakultas pertanian atau perikanan untuk mengkaji potensi produk dan pemasaran BUMDes.
3. Skema Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas Pengelola
 - a. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Pelatihan
 - Menjalin kerjasama untuk mengadakan program peningkatan kapasitas, pelatihan manajemen usaha, dan pengembangan kewirausahaan bagi pengelola BUMDes, contoh Kemitraan dengan politeknik atau lembaga kursus manajemen untuk mengadakan pelatihan bagi pengurus BUMDes.
 - b. Kemitraan dengan BUMDes atau Pelaku Usaha Sukses
 - Bermitra untuk melakukan transfer pengetahuan, studi banding, dan pertukaran pengalaman dalam mengelola usaha secara efektif dan berkelanjutan contoh Kemitraan dengan BUMDes di desa lain yang sudah sukses untuk melakukan studi banding dan pembelajaran praktik terbaik.
 - c. Pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - Memanfaatkan program pendampingan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan. Contoh: Program pendampingan BUMDes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau lembaga non-pemerintah yang relevan.

Dengan memanfaatkan skema-skema kemitraan tersebut secara optimal, BUMDes Desa Warsa akan memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya yang dibutuhkan, baik dalam hal permodalan, pemasaran, maupun pengembangan kapasitas pengelola. Hal ini akan mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan BUMDes secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Warsa.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Warsa dalam memahami peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan desa. Melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti sosialisasi, lokakarya, dan kunjungan lapangan, masyarakat kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep, tujuan, dan manfaat BUMDes.

Selain itu, kegiatan ini juga telah mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Warsa, seperti potensi kelautan, hutan, dan lahan pertanian yang subur. Berdasarkan potensi-potensi tersebut, masyarakat telah menyusun perencanaan awal untuk mengembangkan unit-unit usaha BUMDes, seperti pengolahan hasil laut, budidaya perkebunan kelapa, serta usaha-usaha turunan lainnya.

Untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan BUMDes di Desa Warsa, telah dibahas pula pentingnya membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak terkait. Pemanfaatan skema kemitraan untuk permodalan, pemasaran, dan pengembangan kapasitas pengelola BUMDes menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, masyarakat Desa Warsa kini memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengembangkan BUMDes sebagai penggerak pembangunan dan kesejahteraan desa. Perencanaan yang matang, keterlibatan aktif masyarakat, serta dukungan kemitraan yang kuat diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Desa Warsa di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Buku

Karim, Abdul. “Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).” *Nas Media Pustaka, Makassar*, 2019.

Sagita, Garnies Lellyana, Ni’ami Mutimatun, And M SH. “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Bumdes Tirta Mandiri Klaten).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Jurnal

Aprillia, Ade Rani, Dwi Cahyono, And Ari Sita Nastiti. “Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).” *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 1, No. 1 (2021): 35–44.

Br Siahaan, Shanti Veronica, And Benedhikta Kikky Vuspitasari. “Sinergi Kades, Bpd Dan Pengurus Bumdes Dalam Mewujudkan Pendapatan Asli Desa Melalui Kegiatan Bumdes.” *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 7, No. 2 (2020): 164–79.

Prasetya, Teguh Budi, And Niken Widyastuti. “Penguatan Kelembagaan Sosial--Ekonomi Desa Melalui Bumdes Panggung Lestari Di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.” *Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 15, No. 1 (2020): 55–66.

Ridlwan, Zulkarnain. “Payung Hukum Pembentukan Bumdes.” *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2013).